



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3 & 4, JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 (psw. 5660, 5661), 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670;  
SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- **1427** /PB.7/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : Dua lembar  
Hal : Apresiasi atas Penyampaian Laporan Konsolidasi  
Hasil Analisis Data Penerimaan Dana PFK  
Pegawai Semester II Tahun 2017

8 Februari 2018

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya mengenai tugas analisis dan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (PMK Nomor 262/PMK.01/2016), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan PMK Nomor 262/PMK.01/2016, Direktur Sistem Perbendaharaan telah menyampaikan Surat Nomor: S-6370/PB.7/2017 Tanggal 19 Juli 2017 hal Penggunaan Aplikasi Monitoring Penerimaan Dana PFK Pegawai pada OM SPAN kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala KPPN. Selanjutnya Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor: S-11128/PB.7/2017 tanggal 14 Desember 2017 hal Format Laporan Hasil Analisis Data Penerimaan Dana PFK Pegawai dan Laporan Konsolidasi Hasil Analisis Data Penerimaan Dana PFK Pegawai mengatur agar:
  - a. KPPN menyampaikan Laporan Hasil Analisis Data Penerimaan Dana PFK Pegawai Semester II Tahun 2017 kepada Kanwil DJPb paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun 2018.
  - b. Kanwil DJPb menyampaikan Laporan Konsolidasi Hasil Analisis Data Penerimaan Dana PFK Pegawai Semester II Tahun 2017 kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan paling lambat akhir hari kerja bulan Januari Tahun 2018.

Laporan dimaksud disampaikan secara elektronik dengan menggunakan format pdf.

2. Kami menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb yang telah mengirimkan Laporan Konsolidasi Hasil Analisis Data Penerimaan Dana PFK Pegawai Semester II Tahun 2017 kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan. Berdasarkan data yang diterima hingga tanggal 8 Februari 2018, jumlah Laporan Konsolidasi Hasil Analisis Data Penerimaan Dana PFK Pegawai Semester II Tahun 2017 yang telah diterima Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah sebanyak 31 laporan sebagaimana daftar terlampir.
3. Dapat kami sampaikan bahwa untuk lebih mendukung kegiatan analisis data penerimaan Dana PFK Pegawai sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis dan Konsolidasi Data Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai Pada Instansi Vertikal DJPb, Direktorat Sistem Perbendaharaan bersama dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan telah meningkatkan fitur Aplikasi OM SPAN Modul Monitoring PFK pada user OM SPAN KPPN dan Kanwil DJPb melalui penambahan 4 (empat) menu, yakni:

- a. **Monitoring PFK Salah Satker**, untuk memonitor transaksi penerimaan PFK yang menggunakan akun penerimaan PFK namun tidak menggunakan kode satker 440780, atau sebaliknya.
- b. **Monitoring PFK Pecahan**, untuk memonitor transaksi penerimaan PFK Taperum PNS yang tidak menggunakan tarif sesuai ketentuan.
- c. **Monitoring PFK Salah Jendok**, untuk memonitor transaksi penerimaan PFK yang berasal dari potongan SPM namun menggunakan jenis dokumen yang tidak sesuai. Digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan potongan PFK.
- d. **Monitoring PFK Salah Potong**, untuk memonitor transaksi penerimaan PFK yang berasal dari potongan SPM namun menggunakan akun penerimaan PFK yang seharusnya hanya berasal dari setoran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



R.M. Wiwieng Handayaningsih  
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan